

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ekonomi-politik berupaya membongkar ketimpangan dan perubahan agraria di perdesaan yang sampai saat ini masih menjadi persoalan yang belum teratasi. Studi ini, tentunya terpusat melihat perkembangan kapitalisme, sebagai sebuah sistem produksi dan reproduksi sosial yang berdasar pada relasi kapital dan tenaga kerja. Pada prinsipnya kapitalisme mengejar akumulasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar melalui eksploitasi terhadap tenaga kerja.

Kapitalisme sebagai sebuah pranata kehidupan dominan saat ini, dalam perkembangannya di Indonesia, selain ekspansi industri perkebunan, kehutanan, dan pertambangan melalui perampasan, telah memicu banyak penderitaan petani di perdesaan, terdapat pola yang lebih *soft* tetapi mengakar dalam menciptakan jurang penderitaan petani yang lebih dalam, yaitu introduksi komoditas pertanian pasar ke dalam penghidupan di perdesaan. Henry Bernstein (2015) menyebut hal demikian sebagai “Komodifikasi Subsistensi. Pada proses tersebut petani berubah menjadi produsen berskala kecil yang harus memproduksi kebutuhan hidup (subsistensi) dengan cara bergabung ke dalam struktur pembagian kerja yang lebih luas dan terintegrasi ke dalam mekanisme pasar. Tania Li (2020) melihat hal yang sama, bahwa di perbukitan Lauje Sulawesi Tengah, dengan hadirnya komoditas pasar (coklat), petani telah masuk ke dalam pola penghidupan yang ditentukan oleh mekanisme pasar.

Proses tersebut Tania Li (2020) mengatakan inilah pemicu yang menyebabkan petani Lauje kehilangan kendali atas tanah sebab para petani ketergantungan terhadap pasar coklat yang harganya sangat fluktuatif di tengah biaya produksi semakin meningkat. Ellen Meiksins Wood (2021), mempertegas bahwa corak produksi kapitalis dengan segala dorongan akumulasi nilai lebih, lahir di perdesaan, melalui ragam penetrasi yang menyebar. Kompleksitas persoalan di perdesaan dengan segala dorongan akumulasi kapital, melahirkan satu kenyataan pahit bagi petani di perdesaan Sulawesi Selatan. Tertampil bahwa kemiskinan di Sulawesi Selatan mencapai 8,7% dan dominan berada di pedesaan (BPS, 2023).

Berangkat dari fakta tersebut, kemiskinan sebagai suatu konsekuensi logis dari relasi produksi dan reproduksi kapitalisme, mendorong studi ini lahir sebagai upaya menelusuri dinamika perkembangan kapitalisme di perdesaan Sulawesi Selatan, terkhusus di dataran tinggi Kabupaten Gowa. Dimulai dengan sistem pertanian subsistensi, dimana dalam bentang sejarah panjang pertanian di dataran tinggi Gowa, karakter utama pertanian subsistensi ini, dapat kita lihat dengan jenis komoditas yang ditanam para petani sebelum tahun 1984, seperti jagung, labu,

kedelai dan umbi-umbian. Mereka menanam komoditas tersebut bertujuan sebagai pemenuhan konsumsi pangan disetiap keluarga petani. Kemudian di belakang menyusul rotan hutan yang sudah mulai dibeli, dan perlahan hadir markisa sebagai satu tanaman komoditas pasar yang juga bisa diperjualbelikan di salah satu perusahaan markisa di Makassar. Dari sinilah para petani di dataran tinggi Gowa, mereka bertani bukan lagi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan untuk mendapat uang, yang tentunya akan dipertukarkan dengan kebutuhan reproduksi yang dimediasi langsung oleh pasar.

kentang, wartel, sawi, dan kol, mulai dikenal orang-orang di dataran tinggi, yang diperkenalkan oleh seorang pengusaha pengembang industri pertanian hortikultura dari Pagelangan, Bandung, Jawa Barat. Orang di dataran tinggi menyebutnya H. Ilyas. Dalam kehadirannya H. Ilyas memilih Desa Kanreapia karena ketinggian dan suhunya sangat bagus untuk pengembangan pertanian hortikultura (Hasil Wawancara Dengan H.Ilyas Di rumahnya, Desa Kanreapia, Juli 2022.)

Proses perubahan produksi komoditas pertanian di dataran tinggi Kabupaten Gowa, bukan terjadi begitu saja, melainkan ada banyak ragam penetrasi yang masuk mengintervensi kehidupan orang-orang di dataran tinggi, sehingga perubahan itu cepat bergulir. Hal demikian dapat dilihat pada masa pemerintahan kolonial, melalui pembangunan jalan raya, dimana orang-orang di dataran tinggi Gowa dipekerjakan secara paksa selama puluhan tahun, untuk membangun jalan dari Malino ke Tombolo Pao yang membutuhkan waktu tiga tahun bekerja secara paksa, selain dari pembangunan jalan raya yang menembus kabupaten lain seperti Maros, Sinjai Takalar, dan Jeneponto. Dari pembangunan jalan raya tersebut, salah satu upaya awal dari asal-usul perkembangan kapitalisme di dataran tinggi Gowa yang dapat teridentifikasi dengan masuknya perusahaan kolonial, seperti PT Nitto (sekarang Malino Highland), kemudian menyusul beberapa perusahaan swasta lainnya yang mulai beroperasi di dataran tinggi Gowa.

Kemudian kebijakan tata kelola kawasan hutan yang banyak mengklaim tanah petani di dataran tinggi Gowa yang memicu konflik agraria berkepanjangan, melalui penanaman pohon pinus. Hasil kunjungan ke beberapa kampung di dataran Tinggi Gowa, terdapat sebuah kisah bagaimana orang-orang di dataran tinggi Gowa terusir dari tanahnya melalui Skema ini. Menurut pak Tuo, kisaran tahun 1975 dia dan orang tuanya serta semua petani di kampung tuanya (*Lappara'na Mapung*) diberikan bibit pohon pinus dan jati putih oleh seorang pegawai kehutanan, lalu pegawai tersebut menyuruhnya untuk menanam di tanah garapannya dan di sekitar rumahnya masing-masing, seingat pak Tuo pegawai itu mengatakan bahwa” bibit ini hanya untuk para petani di Mapung”. Karena bibit tersebut hanya untuk mereka, dengan itu pak Tuo dan petani di Lappara'na Mapung kala itu menerima dan menanamnya. Mereka bahkan memperlakukannya sebagaimana tanaman-tanaman lainnya, seperti dirawat, dibersihkan rumputnya dll. Kemudian dua tahun

berlalu, kedua jenis bibit pohon yang ditanamnya sudah besar hingga di penghujung tahun 1978, orang tua pak Tuo dan tiga puluh keluarga petani lainnya di dikeluarkan di kampung Lappara'na Mapung karena tempat tinggal dan kebun mereka yang ditanami dulunya masuk dalam kawasan prgoram penghijauan kehutanan.

Mereka secara terpaksa meninggalkan kampung tua mereka dan saat ini pak Tuo tinggal di Mapung sebagai tempat kedua. Menurut pak Tuo, setelah orang-orang di dikeluarkan di Lappara'na Mapung, tiga puluh keluarga petani lainnya terpencar di beberapa desa tetangga untuk memulai hidup barunya, seperti yang dirasakannya saat ini di Mapung. Kemudian pak Tuo sendiri meninggalkan semuanya dan memulai hidup baru di Dusun Mapung. Lanjut pak Tuo, Jarak dari kampung lamanya (Lappara'na Mapung) dan kampung yang ia tempati saat berkisaran empat kilometer". Pak Tuo yang terusir dari tempat ia hidup dulunya kini mereka tetap terancam bayang-bayang kehutanan sebab, tanah garapannya diklaim kawasan hutan, beda lagi dengan beberapa petani lainnya yang entah dimana ia hidup saat ini dan bagaimana kondisi mereka. Pak Tuo bercerita sambil menghembus asap rokok yang di gulungnya sendiri, sesekali meminum kopi dan melihat kesaya lalu tersenyum, seolah ada hal yang susah di relakan untuk hilang tapi pada kenyataannya telah dihilangkan dan dia melihat didepan mata mereka dan tidak bisa mempertahankan pada saat proses penghilangan itu.

Akhir tahun 1974 sampai 1975 petani di Bulu' Tallua diberikan bibit pohon pinus oleh Yusuf Daeng Paewa atau biasa disapa oleh para petani Bulu' Tallua, Mantri Yusuf, ia berasal dari Makassar dan merupakan pegawai kehutanan, Lanjut Daeng Sonte. Bibit tersebut dibawa ke Bulu' Tallua oleh Pak Baharuddin dengan menggunakan kuda (bahasa lokalnya, *teke'*) dengan upah Rp. 1.500/res, tutur pak Baharuddin, dirumahnya. Kemudian para petani menanamnya bibit pinus tersebut disekitar kebunnya dan beberapa orang menanam dikebunnya masing-masing dengan diberikan upah sekali seminggu, tutur ibu Ramlah, istri Daeng Sonte sekaligus salah satu orang yang menanam bibit pohon pinus dengan model pengupahan demikian Sabtu malam, rumah pak Karim di Biringpanting. Tahun 1978 Daeng Ruma' dan Daeng Badu' serta istri dan anak mereka adalah dua keluarga yang pertama meninggalkan kampung Bulu' Tallua sebab seorang tentara yang bertugas sebagai babinsa di Desa Tonasa memberitahunya bahwa mereka harus meninggalkan Bulu' Tallua, lalu dipertegas dengan penyampaian langsung oleh Pak Sinyo' yang berasal dari Jawa sekaligus pegawai kehutanan Kabupaten Gowa, dirumah Daeng Sa'bang. Pak Sinyo' mengatakan kepada Daeng Ruma' dan Daeng Badu' bahwa, kalau ada yang membakar kayu akan dihukum. Perihal tersebut membuat Daeng Ruma' merasa takut dan terpaksa harus meninggalkan Bulu' Tallua. Pada akhirnya Daeng Ruma' serta istri Daeng Rabiah dan kedua anaknya Hania dan Basri pindah ke kampung Tanggana Romanga yang jaraknya kurang lebih enam kilometer dari Bulu' Tallua. Daeng Ruma' bermukim disana

selama empat tahun dengan bermukim rumah-rumah kebun. Kemudian tahun 1982 Daeng Ruma' dan keluarga pindah ke Biringpanting yang ia diami sampai saat ini, tutur Daeng Ruma' malam, rumah Daeng Ruma' di Biringpanting. Tahun 1989-an Daeng Sonte dan ibu Ramlah harus terpaksa meninggalkan kampung halamannya yakni kampung Bulu' Tallua sebab kampung dan kebunnya masuk kedalam klaim kawasan hutan tahun 1986. Keluarga beliau yang paling terakhir keluar dikampung Bulu' Tallua diantara lima keluarga lainnya.

Dari situasi demikian Kepemilikan tanah mulai tegas setelah para petani terinjeksi beragam kebijakan demi produksi komoditas pasar di dataran tinggi Gowa yang berimplikasi terhadap struktur kelas petani mulai mapan bekerja, dan diferensiasi kelas petani semakin tajam. Dinamika pembentukan kelas petani dan perubahan agraria di pedesaan. Dalam riset ini mencoba metelusurinya melalui kepemilikan petani atas sarana produksi (tanah). Menurut Muchtar Habibi (2023) k elas petani dalam lensa ekonomi-politik agraria terdapat tiga kelas, *pertama* kelas kapitalis, dimana kelas petani kategori ini memiliki tanah dan mempekerjakan orang untuk menggarap tanah miliknya. *Kedua* kelas petani *Petty Comodity Producers* (PCP) kelas petani ini, memiliki tanah tetapi tidak mempekerjakan tanahnya kepada orang lain, dan tidak bekerja di tanah orang lain, dan *ketiga* buruh tani, kelas petani ini, tidak memiliki tanah dan hanya menggarap tanah kelas kapitalis.

Henry Bernstein (2015) pembentukan kelas petani di pedesaan dibangun berdasarkan relasi sosial produksi yang didasarkan atas kepemilikan terhadap tanah. Dinamika kelas petani diidentifikasi melalui hubungannya dengan kelas petani yang memiliki sarana produksi (petani kapitalis) dengan buruh tani. Kemudian kelas petani yang tidak mempekerjakan orang lain dan tidak bekerja dengan orang lain (*pcp*).

Kompleksitas persoalan di perdesaan dataran tinggi Gowa memicu dan mendorong bahwa pentingnya kajian struktur kelas petani dalam mengisi diskursus perubahan agraria perdesaan di dataran tinggi Gowa, atau di Sulawesi Selatan, untuk mengurai pelan-pelan akar persoalan tersebut. Hal ini akan menjadi bahan perbandingan di tengah dominannya diskursus tentang petani dan pedesaan yang kebanyakan diisi oleh perspektif *Developmentalism*, bahwa kita membutuhkan analisis yang jauh lebih kritis dan mampu mengurai persoalan petani dan penghidupan di perdesaan sedikit demi sedikit . Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **"Dinamika Kelas Petani Kentang Di Dataran Tinggi Kabupaten Gowa"**.

1.1 **Masalah Penelitian**

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan mendasar sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perubahan Produksi Komoditas Pertanian di Desa Kanreapia ?
2. Bagaimana Pembentukan Kelas Petani di DataranTinggi Gowa Melalui Perubahan Produksi Komoditas?
3. Bagaimana Dinamika Kelas Petani Kentang di Desa Kanreapia?

1.2 ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mendeksripsikan perubahan produksi komoditas pertanian di Desa Kanreapia
2. Untuk Menguraikan Kelas-Kelas Apa Saja Yang Muncul Dari Proses Perubahan produksi komoditas pertanian di Desa Kanreapia
3. Untuk Mendeskripsikan Dinamika Dalam Struktur Kelas di Desa Kanreapia

1.3 ***Tinjauan Pustaka***

1.3.1. **Struktur Kelas Petani**

Diskursus agraria kritis adalah akumulasi dari perdebatan seputar “Persoalan Agraria” (*Agrarian Question*) yang di dalamnya terdapat kajian petani (*Peasant Studies*) dan ekonomi politik agraria (Fatur, Akram-Lodhi et al.,2023, 2021a; Bernstein & Byres,2021). Diskursus ini menyoroti relasi sosial, dinamika produksi dan reproduksi, dan kepemilikan dalam penguasaan sumber agraria yang diperiksa secara historis hingga kondisi saat ini (Bersntein, 2010). Konsepsi ini berdasarkan pada empat pertanyaan kunci yakni siapa memiliki apa, siapa melakukan apa, siapa dapat apa, dan apa yang mereka lakukan atas penguasaan tersebut.

Analisis ekonomi politik agraria memiliki kaitan yang sangat erat dengan perjuangan kelas yang telah berlangsung ratusan tahun yang lalu yang dimulai dari akumulasi primitif/akumulasi melalui perampasan *Spatio Temporal Fixes* hingga transisi ke sistem kapitalisme (Bersntein, 2010; Muchtar Habibi, 2023; David Harvey,2003; Sangadji, 2021). Proses tersebut menjadi pemicu dari perubahan atau transformasi agraria yang cukup besar terutama dalam eksklusi petani terhadap tanah dan sumber agraria. Pendekatan kerangka ekonomi politik agraria adalah sebuah metode kritis dalam mengurai persoalan agraria dalam perubahannya (Byers,1995), sebab hal ini merupakan sebuah metode analisis yang menggugah sistem kuasa dari kapitalisme yang di dalamperkembangannya disebabkan oleh mekanisme pasar melalui permpasan tanah, eksploitasi (Bernstein, 2010).

Sebuah alat analisis atau cara baca dalam rangka melihat kenyataan, kekuasaan kapitalisme bekerja yang mengungkap para aktor bagaimana mendapatkan akses dan megesklusi petani dari tanah dan pemanfaatan sumber

agraria (Hall et al., 2011; Ribot & Peluso, 2003). Analisis persoalan struktur kelas petani dalam kajian agraria kritis (Akram- Lodhi & Kay, 2010) menyoroti relasi kuasa kapitalisme kemudian menjadi instrument perjuangan bagi buruh tani yang merupakan kelas yang tertindas dalam struktur kelas petani yang lebih luas.

1.3.2. Reforma Agraria

Secara etimologi, agraria berasal dari bahasa latin “*ager*” yang artinya lapangan, pedusunan, wilayah, tanah negara). Istilah agraria mencakupi tanah sebagai suatu yang fundamental karena tanah mewadahi semuanya. “Reforma Agraria” (RA) atau “*Agrarian Reform*” merupakan menata kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (buruh tani, tunakisma) secara menyeluruh dan lengkap. “Penataan ulang” inidisebut “Land Reform” yang memiliki semangat secara makro untuk mengubah struktur masyarakat, dari susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme mejadi susunan masyarakat yang lebih adil dan merata (Gunawan Wiradi, 2005).

Seri kajian reforma agraria di Indonesia masih sering dikaitkan dengan stigmanisasi tentang agenda “komunisme”. (Sitourus & Agung, 2004, 2024) hal demikian memicu tersumbatnya diskursus tentang agrariadi Indonesia, dan kekuasaan Orde Baru meyimpan rapat-rapat konsep agraria versi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan menggunakan konsep agraria yang merujuk kepada Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) 1967 sebagai rujukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (Shohibuddin & Wiradi, 2009).

Reforma agraria yang “*genuine*” (sejati) menurut Chirstodoulou (1990) sifatnya “*drastic*” (tegas), “*fixed in time*” (waktunya pasti). Menurut Peter Dorner (1972) reforma agraria merupakan program “*Ad Hock*” (khusus), proses operasinya harus cepat “*rapid*” (Ellias Tuma, 1965), tetapi dengan prinsip tanah untuk mereka yang betul-betul yang mengerjakannya (penggarap), tanah tidak dijadikan komoditi komersial, dan tanah memiliki fungsi sosial (Gunawan Wiradi, 2005). Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memandatkan proses pelaksanaannya harus mengakomodir semua sektor, mempercepat proses dan menangani konflik.

Diskursus tentang reforma agraria yang mengacu kepada UUPA 1960 telah memasuki tahap perkembangan, saat ini diskursus agraria dikenal sebagai (*Critical Agrarian Studies*) atau kajian agraria kritis. Dalam perkembangan ketiga ini yang dimulai dari diskursus terkait dengan akumulasi primitif, dinamika politik dan akses penguasaan terhadap sumber daya atau pencaplokan lahan petani oleh perusahaan (*Land Grabbing*) (Fairbairn, Fatwa Faturrachmat, et al, 2014, 2015, 2023). Kajianagraria kritis sebelumnya bahkan tidak memiliki penyebutan dalam diskursus ilmu Sosial- Antropologi, namun kajian agraria kritis mulai dikembangkan oleh program kuliah khusus di *Institute Of Social Studies* tahun 2009 di Belanda. Kajian

tersebut menghimpun sejumlah hasil penelitian lapangan para ilmuwan kritis diberbagai disiplin ilmu yang terkait dengan fenomena agraria, penghidupan, bentuk dan proses perubahannya.

1.3.3. Posisi Sosial Petani

Sejak penelitian ini disusun dan ingin melihat dinamika kelas petani, maka penulis memahami siapa dan apa itu petani yang menjadi keharusan. Bersntein (2010) menjelaskan bahwa sebutan “petani” bukan perkara semantik belaka, tetapi memiliki konsekuensi analitis tertentu. Dalam Bahasa Inggris “petani” sering disebut dengan istilah “*Peasant and Farmer*” yang memiliki arti dan konteks berbeda. “*Peasant*” sendiri seorang peneliti sering menggunakan istilah secara silih berganti untuk menggambarkan “petani kecil” sebagai *small farmer* atau petani skala kecil *small-scale farmer* dan petani keluarga *family farmer*.

Defenisi *peasant* merujuk kepada petani subsisten. Sementara *farmer* merujuk kepada petani yang memiliki orientasi akumulasi sebagai introduksi dari kapitalisme (Wolf, 1969). Secara bersamaan ketika ‘*peasant*’ melihat pertanian sebagai alat produksi dan reproduksi sederhana, ‘*farmer*’ melihatnya sebagai alat untuk bisnis dan investasi (Wolf, 1955). Belakangan ini, para peneliti agraria terlihat sepakat dengan mengekspresikan kedua defenisi tersebut dengan silih berganti berdasarkan makna dan konteksnya. Sebab kedua istilah tersebut telah bertransformasi ke dalam kondisi yang sama dengan alasan meluaskan subyek defenisi demi kepetingan massa Gerakan agraria (Edelman, 2013).

Dalam kajian agraria kritis, menempatkan defenisi ini tidak sekedar bersifat oposisi biner semacam itu. Proses tersebut menerjemahkan petani “*peasant*” dan kepetanian “*peasantry*” ini menyeret beragam perdebatan dari beraenaka ragam keilmuan. Upaya mendefinisikan “*peasant*” memang pada dasarnya tidak lahir disiplin ilmu pertanian, tetapi berasal dari antropologi dan sosiologi kritis. Istilah ‘*peasant*’ pertama kali muncul pada akhir abad kegelapan di Eropa. Pada saat itu, kata ‘*peasant*’ memiliki konotasi kasar, bodoh, bebal, primitive dan suka bertindak kriminal (Edelman, 2013). Berkisar tahun 1960-1970an, para peneliti ilmu sosial-kultural mulai tertarik meneliti lebih dalam makna ‘*peasant*’ sekaligus petani masa awal kajian tentang petani “*peasant studies*’. Pembahasan terkait “*peasant*” tersebut dipicu oleh banyak peristiwa perang dan revolusi petani yang tersebar diberbagai belahan dunia (Wolf, 1969).

Beberapa teoritikus menekankan dimensi kultural dari “*peasant*” yang berkonotasi ‘*rakyat biasa*’ (Silverman, 1979), sementara beberapa lainnya menyoroti aspek dan karakter strukturalnya, apakah mereka memberikan perlindungan hak atas tanah atau pemberi sewa, petani bagi hasil atau buruh upahan (Edelman, 2013). Mintz (1973) menyatakan ‘*peasant*’ tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang homogen, mereka memiliki diferensiasi internal dengannya ‘*peasant*’ bersifat

heterogen.

Bersntein (2001) istilah atau penggunaan kata '*peasant*' lebih dekat dengan pembahasan masa pra dan pasca-kapitalis atau masa- masa transisi agraria, dengan itu kapitalisme telah membunuh '*peasant*' atau '*peasantry*' dan menyisahkan mereka yang berhasil bertahan dan beradaptasi dengan relasi sosial kapitalis. Bersntein (2001) menyebut hal demikian sebagai penyusutan kaum tani (*depeasantization*). Berbanding terbalik dengan pandangan Van Der Ploeg (2008) bahwa alih-alih meghilangkan '*peasant*' tetapi malah berkembang atau pembentukan kembali kaum tani. Bagi Van Der Ploeg (2008) dalam memahami '*peasant*' perlu dilihat dalam penyelidikan kondisinya (*peasant conditions*), karena meski terhimpit oleh dominasi kapitalisme '*peasant*' masih memiliki agensi yang cukup kuat untuk bertahan melalui perjuangan kemandirian sesame petani.

Posisi sosial petani, para ilmuwan agraria memberikan tumpuan analisa yang menyandarkan fokusnya pada kajian analisis kelas Marx yang dalam proses penyelidikannya bertumpu kepada status kepemilikan tanah, dan rasio kerja. Habibi (2023) Zhang (2015) menjelaskan bahwa posisi kelas sosial petani mesti ditelaah berdasarkan kepemilikan properti (siapa yang mendominasi sarana produksi dan pekerja yang tidak memiliki sarana produksi) dan hubungannya terhadap pasar seperti hubungan kerja yang memiliki kaitan dengan tanah, dan tenaga kerja.

1.5. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian termutakhir terkait dengan analisis kelas petanidapat ditemukan dalam karya Habibi (2023). Meskipun merujuk kepada konsep Bersntein, hasil penelitian Habibi menampilkan diferensiasi kelas yang cukup dalam dan prosesnya lebih variatif. Habibi juga menampilkan istilah kelas dalam argumentasinya. Habibi menggunakan istilah borjuis/kapitalis dan proletariat dalam tumpuan analisis kelasnya. Hasil penelitiannya menemukan kelas petani antara lain: tuan tanah kapitalis, petani kapitalis, PCP, petani semi proletariat, petani proletariat, proletariat.

Bernstein (2015) Pembentukan kelas petani di pedesaan dibangun berdasarkan relasi sosial produksi yang dibangun berdasarkan kepemilikan terhadap tanah. Berangkat dari hal demikian sebuah analisis kelas petani hanya bisa diidentifikasi melalui hubungannya dengan kelas petani yang memiliki sarana produksi dengan buruh tani yang tidak memiliki sarana produksi yang hanya menjual tenaganya kepada si pemilik sarana produksi. Bernstein (2015) menawarkan sebuah perspektif dalam lensa Marxian untuk melihat fenomena kemiskinan di pedesaan yang terpusat pada kapitalisme dan perkembangannya, yang dimana kapitalisme sebagai sistem produksi dan reproduksi yang didasarkan padarelasi sosial antara kapital dan tenaga kerja.

Dianto Bachriadi (2019), menyebutkan beberapa daerah di Indonesia di

mana perkembangan corak produksi kapitalisme belum sampai pada tahap penghancuran secara total struktur lama, dikarenakan penguasaan tanah feodal dengan tuan tanah masih kuat bekerja. Tetapi dalam keadaan tertentu, corak produksi kapitalisme dalam struktur pertanian feodalisme menjadikan mekanisme bagi hasil sebagai pelipatgandaan nilai lebih dengan tersedianya tenaga kerja murah di pedesaan. Fenomena tersebut tidak lazim dijumpai di negara-negara dunia ketiga yang masih dalam tahap perkembangan, dimana tanah-tanah yang masih dikuasai oleh elit lokal atau para tuan tanah mendorong para petani penggarap diberikan tanah untuk dikerjakan secara produktif, selain dengan tujuan politik massa di pedesaan, hal tersebut akan lebih mempercepat akumulasi dengan dorongan penguatan industri pertanian yang mensubordinasi petani kecil menjadi buruh tani atau buruh upahan di perkotaan.

Tania Li (2020) melihat hal yang sama, bahwa di perbukitan Lauje Sulawesi Tengah, dengan hadirnya komoditas pasar tidak menghancurkan struktur yang lama, tetapi dengan cara memperkenalkan komoditas pasar (kakau) kepada petani untuk di tanam. Proses tersebut Tania Li (2020) mengatakan inilah pemicu yang menyebabkan petani Lauje kehilangan kendali atas tanah sebab para petani ketergantungan terhadap pasar kakau yang harganya sangat fluktuatif. Studi Li (2020) memberikan gambaran bahwa perkembangan kapitalisme di Indonesia sangat berbeda dengan sejarah kemunculan kapitalisme di Eropa dan di beberapa wilayah lainnya, dimana proses perampasan tanah petani yang dilakukan oleh korporasi betul-betul telah menghilangkan struktur lama. Namun di Indonesia memiliki karakter tersendiri.

1.6. Definisi Operasional

1. Agraria merupakan suatu bentang alam yang mencakup keseluruhan kekayaan alami (fisik dan hayati) dan kehidupan sosial yang terdapat didalamnya. Penggunaan kata agraria dalam penelitian ini merujuk pada hubungan-hubungan antara orang atau sekelompok orang dengan lingkungan alam sekitarnya, atau antara orang atau sekelompok orang dengan atau kelompok lainnya yang terkait dengan (penguasaan) sumber daya agraria.
2. Sumber daya agraria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan ruang laut dalam kegiatan budidaya rumput laut.
3. Struktur agraria merupakan tata hubungan antar manusia menyangkut kepemilikan, penguasaan dan peruntukan sumber agraria (Shohibuddin & Wiradi, 2009). Dalam penelitian ini, struktur agraria yang dimaksud merujuk pada akses individu atau sekelompok orang dalam hal penguasaan ruang laut dalam bentuk penguasaan atas lokasi atau lahan budidaya.
4. Aktivitas produksi merujuk pada penggerakan tenaga kerja dan alat-alat kerja

dalam proses budidaya rumput laut mulai dari pemasangan bibit sampai dengan panen.

5. Namun, menurut Spitzberg (2011:78) faktor budaya menjadi pertimbangan yang kuat. Kekuatan produksi merupakan kombinasi dari alat-alat produksi dan tenaga kerja. dalam penelitian ini merujuk pada sarana produksi (lokasi, perahu, bibit, tali bentangan dan alat lainnya) yang digunakan dalam kegiatan budidaya rumput laut. selain itu, tenaga kerja yang dimaksud merujuk pada pengerahan tenaga yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kegiatan budidaya.
6. Hubungan produksi dalam penelitian ini merujuk pada pembagian kerja dan distribusi hasil kerja dalam kegiatan budidaya yang berkaitan dengan penguasaan sarana produksi.
7. Reproduksi merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menjamin aktivitas produksi secara berkelanjutan. dalam hal ini, alat-alat produksi, tenaga kerja, dan hubungan sosial yang berkaitan dengan kegiatan budidaya mesti di reproduksi ulang. Misalnya, bibit yang digunakan dalam kegiatan budidaya mesti dialokasikan untuk pembibitan selanjutnya. Biaya konsumsi dalam penelitian ini merujuk pada alokasi pendapatan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).
8. Biaya pergantian merupakan biaya yang dikeluarkan menggantikan alat-alat kerja yang rusak atau hendak diperbaiki. misalnya biaya mesin, kapal, dan tali bentangan.